

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU DAN BERBASIS MASYARAKAT: TELAAH KASUS DI KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA

J. JOHNNES TULUNGEN

Field Program Manager Proyek Pesisir Sulawesi Utara

crmp@manado.wasantara.net.id

tulungen@manado.wasantara.net.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan berbasis-masyarakat sudah merupakan suatu pendekatan yang banyak dipakai di dalam program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di berbagai negara di dunia ini, khususnya di negara-negara berkembang. Pendekatan ini secara luas digunakan di wilayah Asia Pasifik seperti di negara-negara Filipina dan Pasifik Selatan. Keberhasilan pendekatan ini semakin banyak dan didokumentasi secara baik (Polotan-de la Cruz, 1993; Buhat, 1994; Pomeroy, 1994; White *et.al.*, 1994; Ferrer *et.al.*, 1996; Pomeroy and Carlos, 1997; Wold Bank, 1999). Di negara-negara dimana sistem pemerintahannya semakin mengarah pada desentralisasi dan otonomi lokal, pendekatan berbasis masyarakat ini dapat merupakan pendekatan yang lebih tepat guna, lebih mudah dan dalam jangka panjang dapat terbukti lebih efisien dan efektif dalam segala hal.

Pendekatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat telah dicobakan diberbagai proyek pembangunan di Asia yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Internasional. Sebagai contoh, Program Sektor Perikanan di Filipina yang bernilai 150 juta US dolar (Albaza-Baluyut, 1995), Proyek Coremap di Indonesia, juga berbagai proyek bantuan bilateral lainnya (seperti CRMP -Filipina dan Proyek Pesisir - Indonesia), memasukkan pengelolaan berbasis masyarakat sebagai bagian dari desain program. Filipina memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang dalam pengelolaan berbasis masyarakat sejak sekitar dua dasawarsa terakhir ini. Pendekatan ini telah menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di negara ini sebagai bagian dari system pemerintahan yang desentralistis. Pada pergantian millenium ini telah ada ratusan contoh Pengelolaan

sumberdaya pesisir berbasis masyarakat yang tersebar di hampir setiap wilayah pesisir di negara ini.

Di Indonesia, dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten memberikan peluang yang besar bagi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan berbasis masyarakat. Selain itu dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan dan konteks perubahan pemerintahan di Indonesia setelah era reformasi mendorong pemerintah pusat dan di daerah mengembangkan pendekatan pembangunan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan secara bersama (*co-management*) berbasis masyarakat.

Upaya-upaya seperti ini sudah di mulai di Sulawesi Utara sejak tahun 1997 untuk mengadaptasikan pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat ini dalam konteks pembangunan dan pengelolaan di Indonesia (Crawford & Tulungen, 1998a, 1998b, 1999a, 1999b,; Tulungen *et.al.*, 1998, 1999; Crawford *et.al.*, 1998) lewat Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Project - CRMP*). Proyek Pesisir yang dimulai sejak tahun 1997 ini didasarkan pada pemikiran/hipotesa bahwa pendekatan partisipatif dan desentralistis akan mengarah lebih pada berkelanjutan dan adil/seimbang nya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia. Setelah melakukan kegiatan dan upaya selama empat tahun di Sulawesi Utara, contoh-contoh praktek pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan yang mendukung validitas pemikiran/hipotesa dari Proyek Pesisir. Makalah ini merangkum pendekatan dan

pengalaman Proyek Pesisir dalam pengembangan Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir tingkat desa yang dilaksanakan lewat proses terpadu antara partisipasi masyarakat, keterlibatan pemerintah setempat dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang telah menghasilkan berbagai luaran positif dan nyata dilapangan.

Konsep Dasar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat

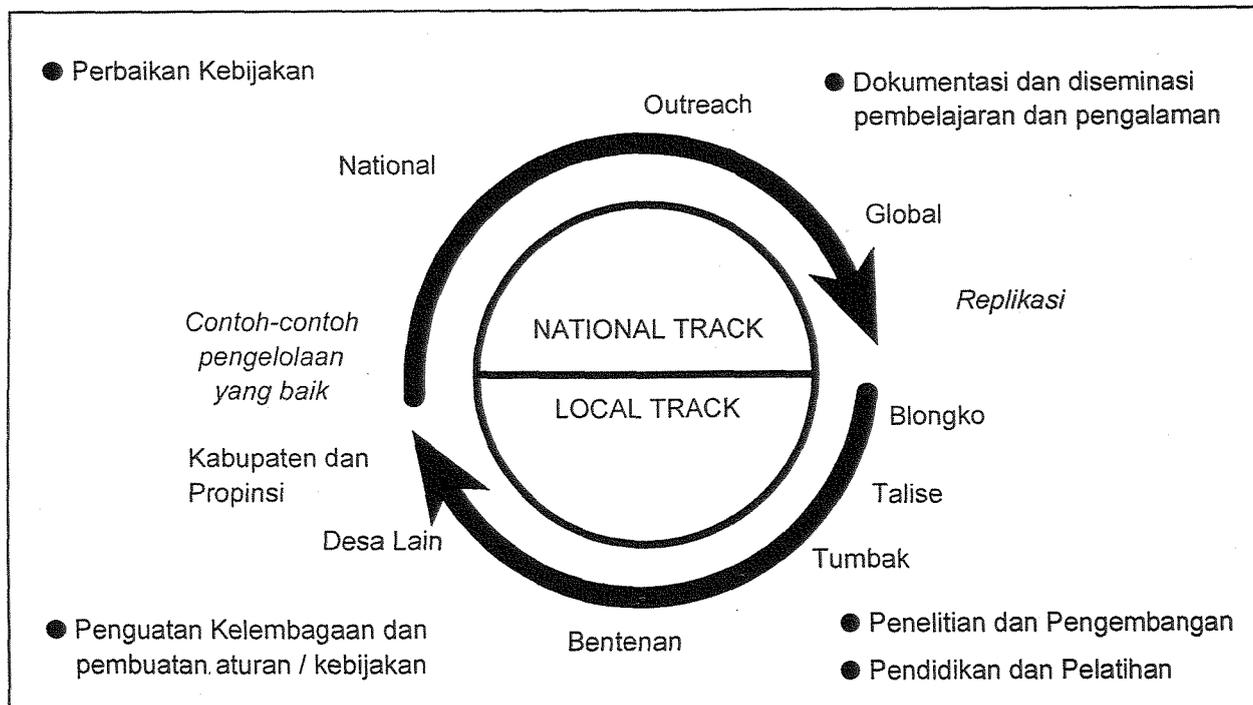
A. Pendekatan dua arah Proyek Pesisir

Saruan (1998) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu masih merupakan hal yang relatif baru dalam pembangunan mengingat hal ini baru tercantum dalam GBHN 1993 dan Repelita VI. Seiring dengan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu telah dirasakan perlunya desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Diharapkan perencanaan lebih dititik beratkan pada bottom up planning berupa proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting dari bawah yang dikombinasikan dengan top down planning berupa

kebijakan, aturan-aturan dan dukungan/bantuan teknis dari atas. Berdasarkan pemikiran ini Proyek Pesisir menggunakan pendekatan dua arah ini sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.

Pengelolaan secara desentralisasi sudah semakin mendesak untuk dilaksanakan mengingat terdapat banyaknya kasus tumpang tindih perencanaan, konflik kebijakan, dan kompetisi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berakibat pada ketidakjelasan kewenangan dan terabainya upaya pelestarian sumberdaya pesisir dan laut (Ginting, 1998)

Di Sulawesi Utara, tujuan Proyek Pesisir adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang baik/efektif - lewat pengembangan dan penggunaan metode, strategi, kegiatan perencanaan dan aturan-aturan lokal - yang dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir dan meningkatkan atau mempertahankan kondisi sumberdaya pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupannya. Pendekatan dengan desentralisasi ini didasarkan pada hipotesa bahwa pendekatan pengelolaan secara desentralisasi, partisipatif dan kolaboratif akan menghasilkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya pesisir yang lebih berkelanjutan/lestari



Gambar 1. pendekatan dua arah (two track approach) Proyek pesisir

dan seimbang/adil daripada pendekatan secara terpusat.

Dalam mencapai tujuan ini diperlukan upaya-upaya langsung untuk mencapai: (1) peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir; (2) memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal, dan; (3) memperkuat kapasitas lembaga lokal.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun-tahun pertama kegiatan proyek, program lapangan Sulawesi Utara kemudian memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat yakni:

- Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa
- Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis-masyarakat tingkat-desa
- Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat tingkat-desa

Hasil yang ingin dicapai dari berbagai pendekatan ini adalah antara lain:

- Menguatnya kapasitas lembaga dan perorangan setempat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu
- Membaiknya perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat lokal
- Semakin besarnya partisipasi *stakeholder* dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumberdaya pesisir
- Stabil dan membaiknya kondisi habitat dan sumberdaya pesisir
- Lestari dan seimbangya kesempatan-kesempatan ekonomis bagi masyarakat setempat yang tergantung kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan yang baik di wilayah pesisir.

B. Pengelolaan Secara Terpadu

Untuk mencapai tujuan di atas maka Proyek Pesisir, belajar dari pengalaman dunia mengadopsi pendekatan siklus kebijakan pengelolaan sumberdaya wilayah Pesisir terpadu (*ICM policy cycle*) kedalam program pengelolaan berbasis masyarakat (Gambar 2).

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu (PSWPT) didefinisikan sebagai "Proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan

pengelolaan, dan kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem Pesisir" (GESAMP - *Group of Expert on scientific Aspect of Marine Protection*, 1996).

Tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah Pesisir terpadu menurut GESAMP adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumberdaya wilayah pesisir dan pada saat yang bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir memiliki beberapa aspek yang mencakup aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat), aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan) dan aspek biodiversity (menjamin keanekaragaman biologis) ekosistem wilayah pesisir.

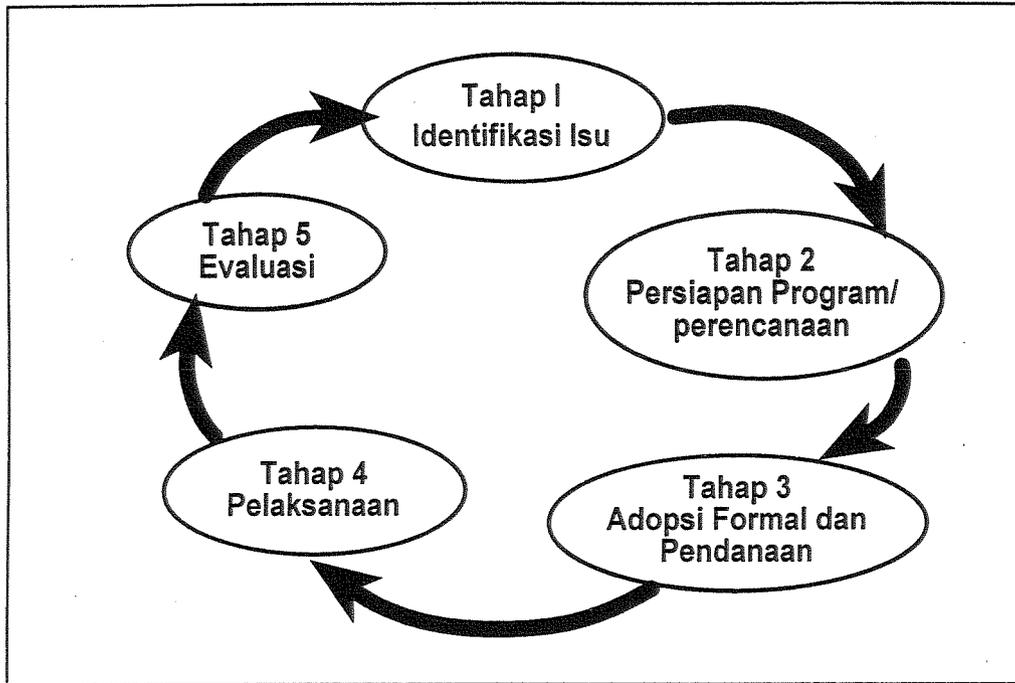
Yang dimaksud dengan pesisir adalah: suatu tempat dimana terjadi pertemuan antara daratan dan lautan yang mencakup lingkungan disepanjang garis pantai dan air.

Ciri-ciri Wilayah Pesisir meliputi antara lain:

- Wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi dan geologis yang sangat cepat.
- Tempat dimana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam dan merupakan tempat bertelur, tempat asuhan dan berlindung berbagai jenis spesies
- Ekosistemnya yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara sungai, lamun dsb yang merupakan pelindung alam yang penting dari erosi, banjir dan badai serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut
- Sebagai tempat tinggal manusia, untuk sarana transportasi, dan tempat berlibur atau rekreasi

Sumberdaya wilayah pesisir mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia antara lain karena:

- Wilayah pesisir adalah tempat yang paling kaya secara ekonomis dan ekologis
- Tempat berbagai fasilitas seperti pelabuhan dan industri berada
- Sumber mineral dan pertambangan: minyak, gas, emas, pasir, bahan galian dsb.
- Sumber energi
- Tempat yang sangat disenangi untuk kegiatan



Gambar 2. Siklus Kebijakan Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu ✓

- pariwisata dan tujuan berlibur
- Tempat tinggal lebih dari setengah populasi dunia, 2/3 kota-kota besar berada di wilayah Pesisir
- Tempat buangan sampah dan kotoran

Sebagai contoh, salah satu ekosistem wilayah Pesisir penting yaitu terumbu karang mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Terumbu karang berfungsi antara lain sebagai: tempat menangkap ikan, pariwisata, pelindung pantai, dan tempat keanekaragaman hayati yang penting bagi manusia. Dalam hal perikanan, terumbu karang merupakan tempat hidup berbagai ikan karang, kerang, lobster, dan kepiting yang mahal harganya. Jumlah panen yang diperoleh di wilayah terumbu karang di dunia mencapai 9 juta ton per tahun atau sekitar 12 % dari keseluruhan penangkapan perikanan. Sebagai contoh, di Filipina, Terumbu karang yang baik dapat menghasilkan sebanyak 15,6 ton/km²/tahun. Total keuntungan atau pendapatan dari perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dari pariwisata, perikanan berkelanjutan dan perlindungan pesisir dari abrasi berkisar antara 32.000 - 113.000 US\$/km²/tahun (White & Cruz-Trinidad, 1998).

Arti terpadu dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu adalah menyangkut berbagai dimensi:

- Terpadu antar sektor
- Terpadu antar ekosistem (ruang) darat dan air di wilayah Pesisir
- Terpadu antar tingkatan pemerintahan
- Terpadu antara disiplin ilmu - pengelolaan
- Terpadu antara bangsa (internasional) dan politik

Berdasarkan pengertian di atas maka prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir (PSWP) harus mencakup dan berprinsip pada:

- Program PSWP memerlukan pendekatan menyeluruh (holistic), terpadu dan multi-sektor.
- Perencanaan PSWP harus konsisten dengan dan dipadukan dengan rencana kabupaten, propinsi, dan nasional. Termasuk rencana pembangunan berkelanjutan tingkat pusat (APBN)
- Perencanaan harus konsisten dengan kebijakan lingkungan perikanan di Departemen Perikanan dan Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup Nasional
- Dikembangkan dan diintegrasikan kedalam program di lembaga yang sudah ada.
- Proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok dan komunitas yang akan terimbas oleh keputusan dan program. Masyarakat umum

dan kelompok-kelompok masyarakat harus dilihat sebagai partner yang seimbang (*equal*) dalam pengambilan keputusan melalui lingkup pengelolaan bersama (*co-management*). Semakin tinggi tingkat keterlibatan (partisipasi) masyarakat semakin tinggi tingkat keberhasilan program.

- Program harus dibangun dan didasarkan pada kapasitas lokal atau kapasitas masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan
- Program harus berupaya untuk membangun mekanisme pendanaan secara swadaya (*self-reliant financing mechanism*) untuk pelaksanaan secara berkelanjutan
- Program harus menjawab isu-isu kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat lokal dan isu konservasi (perlindungan sumberdaya).

C. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir-Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) belum banyak ditemukan contohnya di Indonesia. Keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sudah banyak dikenal dalam kegiatan irigasi, hutan masyarakat dan pertanian. Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sektor perikanan dan kelautan umumnya masih dalam tahap pengembangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh rumitnya sistem sumberdaya pesisir dan laut serta struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir.

PSWP-BM bertujuan untuk lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik, yang dibutuhkan tinggal dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka. Keuntungan potensial utama dari PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas *sustainability* (kesinambungan). Kelemahannya adalah terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena sifat dasarnya yang antara lain :

- Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan

- Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan, pemantauan dan penegakan aturan ✓
- Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya yang memungkinkan mereka mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan jangka panjang ✓
- Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat mengemukakan strategi sesuai keinginan dan kondisi mereka ✓
- Menuntut fleksibilitas agar dapat dengan mudah disesuaikan dan diubah berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat
- Membutuhkan pemanfaatan secara optimal pengetahuan dan keahlian lokal/tradisional dalam pengembangan strategi
- Menuntut kemitraan (*partnership*) yang dinamis dengan berbagai pihak dalam masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang jelas
- Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan bagi PSWP-BM dan dukungan dana maupun bantuan teknis dari pemerintah setempat

PSWP-BM bukanlah merupakan satu-satunya pendekatan dalam pengelolaan dan mungkin tidak akan cocok atau sesuai dilaksanakan pada setiap masyarakat pesisir. Diperlukan upaya hati-hati dalam penerapan PSWP-BM terutama dalam masyarakat yang kapasitasnya belum memadai untuk itu. Kalau hendak dijalankan diperlukan investasi bagi pengembangan kapasitas masyarakat sehingga tahap-tahap awal dalam program PSWP-BM akan banyak memfokuskan kegiatan pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan perorangan dalam pengelolaan kepada masyarakat dan lembaga setempat.

Kriteria Pengelolaan Berbasis Masyarakat :

- Persiapan, perencanaan dan monitoring oleh masyarakat sendiri ✓
- Komitmen dan rasa memiliki yang tinggi dari penduduk
- Penentuan isu dan prioritas oleh masyarakat
- Manfaat/keuntungan bagi mayoritas masyarakat
- Mulai dari apa yang masyarakat miliki (pengetahuan, sumberdaya, lembaga, pemimpin)
- Keputusan diambil bersama
- Perlunya konsultasi formal dan informal *konstruktif*
- Informasi seimbang
- Terbuka

Kunci Keberhasilan PSWP-BM mencakup:

- Batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi
- Kejelasan anggota
- Keterikatan dalam kelompok
- Manfaat lebih besar dari biaya
- Pengelolaan sederhana
- Legalisasi dari pengelolaan
- Kerjasama dan kepemimpinan dalam masyarakat
- Desentralisasi dan pendelegasian wewenang
- Koordinasi antar pemerintah dan masyarakat
- Pengetahuan, kemampuan dan kepedulian masyarakat
- Fasilitator (SDM, paham konsep, mampu memotivasi masyarakat, tinggal bersama, diterima oleh semua pihak)

Faktor sosio-kultural-ekonomi dan lingkungan dalam PSWP-BM

Program PSWP-BM didasarkan pada pemahaman atau hipotesa bahwa perubahan ekosistem yang terjadi sekarang ini di wilayah pesisir akan mengurangi kemampuan jangka panjang dari sistem ini untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dan kondisi sumberdaya yang cukup baik dan juga akan mengurangi kemampuannya untuk menghasilkan kesejahteraan yang *sustainable*.

Ada berbagai faktor atau isu-isu yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan program PSWP-BM sebagaimana dirangkum berikut ini:

Isu-isu Kelembagaan:

- Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan terpadu
- Kurangnya pengetahuan bagaimana pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia
- Konflik dan tumpang tindih peraturan/antar lembaga
- Kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir
- Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada
- Kurangnya partisipasi dan keterlibatan berbagai sektor
- Kurangnya pengakuan terhadap pengelolaan tradisional dan *indigenous knowledge* (kearifan lokal)

Isu-Isu Sosial:

- Pertumbuhan penduduk
- Kemiskinan
- Hilangnya akses
- Isu kesehatan masyarakat

- Meningkatnya konflik sosial
 - Kebebasan berpolitik dan hak asasi
- Isu Degradasi Lingkungan:
- Menurunnya kualitas air
 - Menurunnya ikan-ikan yang tergantung pada daerah pesisir (wetland, rawa, bakau, karang, lamun, dll.)
 - Perusakan habitat penting secara langsung atau tidak langsung baik oleh alam maupun oleh manusia, seperti perusakan terumbu karang akibat cara penangkapan yang salah (dengan menggunakan bahan peledak, racun, trawl) penambangan karang dan pasir, sedimentasi, penebangan mangrove, erosi pantai
 - Degradasi aset budaya dan keindahan akibat pembangunan yang kurang menghargai aset dan keindahan wilayah pesisir
 - Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai
 - Banjir dan badai laut

Kerangka Kerja Konsep Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir - Berbasis Masyarakat

Program-program PSWP-BM haruslah dikembangkan dan berprinsip sebagai program sukarela (*voluntary program*) bagi masyarakat dan desa di wilayah pesisir dimana dalam pelaksanaannya bantuan teknis dan pendanaannya ditopang/dianggarkan oleh lembaga/instansi pemerintah kabupaten maupun propinsi ataupun lewat swadaya dan usaha masyarakat/desa. Sedangkan tujuan, rencana pengelolaan dan pelaksanaan program ditentukan oleh masyarakat setempat berdasarkan dan mengikuti kebijakan/aturan/pedoman yang dibuat atau disepakati oleh pemerintah setempat. Secara umum pendekatan program berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara (lewat model-model di atas) dalam rangka menopang (*support*) masyarakat yang memanfaatkan sumberdayanya untuk: memutuskan siapa yang akan memanfaatkan sumberdaya dan bagaimana memanfaatkannya, dan melaksanakan pilihan-pilihan pengelolaan yang mereka tetapkan. Berikut ini akan dijelaskan proses dan langkah-langkah program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa.

Adapun kerangka kerja konsep (*conceptual framework*) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara

sebagaimana digambarkan dalam siklus kebijakan dalam Gambar 2 mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Isue
2. Persiapan Perencanaan
3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan
4. Pelaksanaan dan Penyesuaian

Langkah ke 5 yakni monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masyarakat dan Proyek Pesisir dalam setiap langkah dan tahapan di atas untuk mereview setiap langkah.

Model program bagi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat alurnya dapat dijelaskan dalam Tabel 1 (terlampir). Model ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh program menyangkut kegiatan yang dilakukan dan hasil dari tiap kegiatan. Setiap langkah dalam proses memiliki sejumlah capaian antara yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Proses dan kegiatan serta capaian ini akan mengarah pada tujuan akhir atau dampak yang dihasilkan. Table 2 dan 3 (terlampir) merupakan versi yang lebih rinci dari Tabel 1, yang merinci langkah-langkah utama, kegiatan dan hasil yang diharapkan dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan berbasis masyarakat.

Proses Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu - Berbasis Masyarakat

Berdasarkan model konsep dan kerangka kerja yang digambarkan dalam Gambar 1 di atas serta tabel 1 dan 3 (terlampir) maka Proyek Pesisir malakukan berbagai seri kegiatan sebagai berikut:

Identifikasi Isue

Identifikasi masyarakat : Satu rangkaian kriteria ditetapkan dan dipakai untuk memperkirakan penerimaan secara cepat dan mudah metode/cara pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan juga dalam membangun kapasitas masyarakat dalam mengambil alih tanggungjawab pengelolaan. Kriteria tersebut antara lain:

- Tingkat tekanan atau derajat kerusakan sumberdaya akibat pemanfaatan yang tidak lestari (rendah/kecil)
- Ikatan sosial dan politik masyarakat (tinggi/kuat)
- Ketergantungan masyarakat terhadap

sumberdaya pesisir (tinggi)

- Kecenderungan masyarakat untuk konservasi sumberdaya (tinggi)
- Ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan dan tujuan program (tinggi)

Kriteria di atas dijadikan acuan oleh Tim Kerja Propinsi dan Proyek Pesisir untuk menentukan lokasi desa dimana model/ccontoh akan dikembangkan selain kemudahan koordinasi, model pulau kecil, keragaman isu-isu utama dan keragaman kelompok etnis serta strategi diseminasi model/ccontoh.

Orientasi dan penyiapan masyarakat : Sebelum rencanan pengelolaan dibuat maka upaya awal perlu dilakukan untuk menerangkan dan menjelaskan tujuan program, proses yang akan dilalui, dan manfaat yang akan diperoleh kepada masyarakat. Keterlibatan dan hubungan yang terus-menerus dalam masyarakat sangat penting dan dilakukan dengan penempatan secara tetap pendamping masyarakat (penyuluh lapangan) yang berasal dari di luar desa dan melibatkan seorang asisten/motivator desa dari masyarakat setempat. Tenaga lapangan ini harus ditopang atau dibantu oleh tim teknis yang akan memberikan bantuan atau pelayanan teknis untuk isu-isu tertentu jika diperlukan. Orientasi dan penyiapan masyarakat ini diisi dengan berbagai kegiatan pendidikan lingkungan hidup (penyuluhan), pelatihan (*training*), *workshop* dan studi banding serta keikutsertaan dalam seminar, konferensi dan rapat (secara regional maupun nasional). Pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat berupa penyuluhan mengenai terumbu karang, konsep daerah perlindungan, hutan, hukum lingkungan, habitat dan ekosistem wilayah pesisir dan pengorganisasian masyarakat. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan pengamatan terumbu karang (manta tow), pelatihan menyelam, pelatihan pengukuran dan pemantauan profil pantai, pelatihan pengelolaan keuangan, serta pelatihan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu (*ICM training*). *Workshop* yang dilakukan seperti *workshop* penyusunan profil desa, *workshop* penyusunan rencana pengelolaan desa, *workshop* kelompok pengelola dll. Studi banding seperti studi banding DPL di Pulau Apo, Filipina, pengelolaan hutan bakau seperti di Sulawesi Selatan dan study banding usaha kecil dan wisata alam seperti di Bunaken, Malalayang dan Manado serta kunjungan silang (*cross visit*) antar masyarakat desa.

Orientasi dan penyiapan masyarakat lewat PLH, pelatihan, studi banding dan keterlibatan dalam seminar, konferensi dan pertemuan-pertemuan ini bertujuan juga untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat desa dan pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Pengumpulan data dasar : Data dasar mengenai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan diperlukan untuk menentukan atau menilai pencapaian hasil dari adanya intervensi proyek. Dalam rangka kesepakatan dan mencoba model dan cara yang baik di lokasi percontohan, survey dan analisa secara mendalam yang memadukan teknik empiris dan sistematis dengan tehnik partisipatif perlu dilaksanakan. Hal yang sama harus juga dilakukan di desa kontrol untuk membandingkannya dengan desa percontohan dimana intervensi proyek dilakukan. Data dasar yang dikumpulkan antara lain data sosial, ekonomi, lingkungan, dan sejarah. Selain data dasar dilakukan juga studi teknis seperti potensi sumberdaya (mangrove, hutan dan hidupan liar, mariculture) serta strategi Pendidikan Lingkungan Hidup di masyarakat.

Identifikasi, prioritas dan penetapan isu: Identifikasi isu dilaksanakan berdasarkan penilaian dari tenaga teknis ahli/pakar berdasarkan survey/studi lingkungan dan sosial ekonomi di atas, juga oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal dan informal, diskusi mendalam dengan informan-informan kunci, diskusi dengan masyarakat umum dari berbagai tingkatan dan kelompok-kelompok *stakeholder*, serta observasi langsung dari pendamping masyarakat dan asisten penyuluh lapangan. Perkiraan empiris mengenai beratnya isu dibuat oleh tim teknis. Persepsi mengenai berat tidaknya isu dan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan ditentukan oleh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan formal maupun informal, diskusi maupun workshop. Monitoring partisipatif dimulai oleh dan bersama masyarakat tergantung pada isu (misalnya monitoring dan pemetaan terumbu karang, monitoring pantai akibat erosi pantai). Studi teknis mengenai isu-isu spesifik dapat dilakukan oleh konsultan luar jika diperlukan informasi tambahan yang lebih detail diperlukan bagi penentuan rencana pengelolaan dan pengambilan keputusan. Namun demikian hasil dari studi teknis dan rekomendasinya harus di sampaikan kepada masyarakat. Isu-isu yang diidentifikasi baik oleh masyarakat yang didukung

oleh studi teknis dan survey oleh tenaga teknis dan penyuluh lapangan diverifikasi, dikumpulkan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang produk akhirnya didokumentasi dalam bentuk Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa (Kasmidi et.al., 1999; Tangkilisan et.al., 1999). Profil ini dipakai sebagai dasar bagi masyarakat desa menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan terpadu berbasis-masyarakat di masing-masing lokasi/desa.

Persiapan Perencanaan

Pilihan yang dikembangkan adalah kombinasi dari masukan dan usulan teknis dari staf teknis yang dipadukan dengan rekomendasi dan ide/pikiran dari masyarakat sendiri. Harus ada komitmen dan kesepakatan dari sebagian besar masyarakat sebelum kegiatan dan strategi ditetapkan untuk dilaksanakan. Untuk memulai rencana pengelolaan diperlukan kelompok inti yang merupakan perwakilan masyarakat yang akan merumuskan rencana pengelolaan tersebut. Sebelum kelompok inti ini bekerja mereka dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan penyusunan rencana pengelolaan dan mencoba membuat draft rencana pengelolaan yang akan menjadi pemicu dan dasar diskusi konsultasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil dari draft rencana pengelolaan ini kemudian disosialisasikan kepada masyarakat lewat pertemuan dan konsultasi baik secara formal dan informal untuk mendapatkan masukan, tambahan dan koreksi dari masyarakat, pemimpin formal dan informal, pemerintah desa dan *stakeholder* yang ada di desa. Pelaksanaan awal untuk mencoba prosedur dan struktur pengelolaan, dan membangun dukungan bagi rencana jangka panjang dan rencana yang menyeluruh dikembangkan dan diusulkan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan proyek seperti: penanaman bakau, pembuatan MCK, pengadaan air bersih, dan pembuatan tanggul; atau diusulkan oleh tim proyek dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan masyarakat seperti: pembersihan Bintang Laut Berduri (*Crown of Thorns-CoTs*), pembuatan daerah perlindungan laut, dan pembuatan pusat informasi.

Persetujuan Perencanaan dan Pendanaan

Persetujuan dan Adopsi : Masyarakat menentukan prioritas isu dan tujuan bagi pengelolaan dan kegiatan. Penyuluh lapangan dapat

menambahkan/ memberikan masukan, rekomendasi dan tambahan ide tetapi keputusan dan pilihan adalah hak dan tanggungjawab masyarakat. Proses penetapan dan kesepakatan diupayakan setelah ada konsensus dan dukungan dari mayoritas masyarakat. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan adil agar supaya dipahami oleh semua pihak bahwa proses penentuan/pengambilan keputusan diketahui dan didukung oleh mayoritas masyarakat dan stakeholder. Rencana pengelolaan dan aturan lokal harus disepakati secara formal oleh unsur pemerintah dan kepala desa. Aturan formal tersebut adalah dalam bentuk Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD atau wakil masyarakat melalui rapat musyawarah desa. Oleh pemerintah setempat bersama-sama dengan anggota KTF kemudian memutuskan untuk mengadopsi Rencana Pengelolaan tersebut juga sebagai rencana pembangunan desa.

Pendanaan: Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana pengelolaan, idealnya dimana kegiatan tersebut membutuhkan bantuan dana, maka usulan dananya akan diintegrasikan dalam proses DIP/DUP yang diawali dengan rapat Musyawarah Pembangunan (Musbang) di desa dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di kecamatan sampai kabupaten yang kemudian dianggarkan dalam APBN/APBD. Sedangkan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya yang besar dapat dilakukan secara swadaya masyarakat, lewat upaya yang sah dari masyarakat maupun lewat pendapatan asli desa. Kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dapat dibiayai oleh desa dan belum masuk dalam APBN/APBD dapat diusahakan oleh badan/kelompok pengelola lewat bantuan lain dari lembaga/donatur di dalam dan di luar desa/daerah.

Pelaksanaan dan Penyesuaian

Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin dilaksanakan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pengelola sumberdaya utama. Pendanaan dan bantuan teknis dapat diberikan oleh proyek maupun pemerintah kabupaten/propinsi jika diperlukan. Apabila ada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat misalnya: pengaspalan jalan dan pembuatan sarana air bersih. Kegiatan dalam rencana pengelolaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan perubahan

yang terjadi di desa. Penyesuaian ini harus dilakukan secara terbuka dan atas persetujuan masyarakat dan kelompok pengelola bersama-sama dengan pemerintah desa. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dilaksanakan secara terbuka, disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan dipresentasikan kepada pemerintah di tingkat Kabupaten untuk diketahui dan didukung. Pelaksanaan rencana kerja tahunan dilaksanakan oleh masyarakat melalui kelompok/badan yang ada di desa yang bertugas/ditugaskan untuk itu.

Monitoring dan evaluasi: Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk menilai kegiatan dan hasil capaian dari setiap kegiatan. Proses dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini telah diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan. Review tahunan dilaksanakan oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan atau dukungan pemerintah setempat, dan dilaksanakan sebelum siklus pendanaan tahun anggaran berikutnya dimulai sebagai masukan bagi rencana kegiatan tahunan berikutnya. Pelaporan terhadap pelaksanaan dan penggunaan keuangan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat dengan membuat laporan formal yang diumumkan dalam pertemuan-pertemuan formal dan informal serta di papan-papan informasi desa. Pemerintah Desa dan BPD atau lembaga lain di desa bertanggung jawab mengevaluasi dan mengaudit program dan penggunaan dana. Hasil evaluasi ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jika dalam pelaksanaan terdapat temuan-temuan yang tidak sesuai dengan rencana kerja atau terdapat penyimpangan penggunaan keuangan maka BPD dan Hukum Tua (Kepala Desa) harus menetapkan solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

Isi Rencana Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

Mengikuti proses dan langkah-langkah di atas maka masyarakat dan pemerintah desa di tiga lokasi (empat desa) Proyek Pesisir telah berhasil secara partisipatif, terbuka, transparan dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Kabupaten dan Propinsi), membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan tingkat desa.

Struktur dokumen Rencana Pembangunan dan

Pengelolaan ini terdiri dari:

- Keputusan Desa mengenai Kesepakatan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
- Gambaran Umum dan Latar Belakang Desa
- Proses Perencanaan dan Tujuan dari Rencana Pengelolaan
- Visi Masyarakat Desa
- Pengelolaan Isu-isu (berisi gambaran mengenai isu, tujuan, strategi, kegiatan dan hasil yang diharapkan)
- Struktur Kelembagaan
- Monitoring dan Evaluasi

Instansi pemerintah daerah yang tergabung dalam Kabupaten Task Force memandang bahwa rencana pengelolaan desa ini dapat dipakai sebagai proses percobaan perencanaan *bottom-up* dalam jiwa UU no 22 yang baru yang apabila berhasil dapat diterapkan dalam program pembangunan secara umum di Sulawesi Utara. Ada keinginan yang kuat dari lembaga-lembaga ini untuk mencoba dan mengadopsi pendekatan pengelolaan ini secara adaptive yaitu bahwa berbagai perubahan dalam prosedur dan struktur pelaksanaan mungkin diperlukan dalam rencana pengelolaan ini. Terdapat pula kemauan dan antusias yang kuat untuk menjadikan pelaksanaan dari rencana pengelolaan ini dapat berhasil sehingga dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa lain di Sulawesi Utara.

Berdasarkan rencana pengelolaan ini maka di buat rencana aksi tahunan oleh badan pengelola dimana penentuan prioritas kegiatan dan rencananya ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat desa secara transparan dan terbuka yang dikoordinasi oleh badan pengelola, sedangkan petunjuk, kebijakan dan bantuan teknis serta dananya diperoleh dari pemerintah daerah (dinas dan instansi yang berkepentingan), APBD/APBN langsung, LSM, perguruan tinggi dan donatur, serta dari pendapatan dan usaha yang sah dari desa maupun lewat swadaya masyarakat.

Di Sulawesi Utara, contoh rencana pengelolaan yang dikembangkan oleh masyarakat sudah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah di desa maupun di tingkat kabupaten dan propinsi beserta lembaga-lembaga terkait yang ada di daerah. Tahap pelaksanaan Rencana Pengelolaan ini sudah dimulai dalam Tahun Anggaran 2000. Proyek Pesisir membimbing masyarakat, pemerintah desa dan Badan Pengelola yang dibentuk untuk melaksanakan

rencana pengelolaan ini. Bantuan teknis berupa pendampingan dan pedoman dalam membuat rencana aksi tahunan, pelaksanaan dan monitoring akan dikembangkan oleh masyarakat bersama-sama pendamping masyarakat Proyek Pesisir. Untuk mendorong masyarakat dan pemerintah memulai pelaksanaan, Proyek Pesisir telah memberikan bantuan financial (grant) pada setiap desa dan dana pendamping juga diperoleh dan di tunjang oleh dana dari masyarakat dan dari pemerintah daerah baik dari BAPPEDA maupun dari dinas/instansi terkait lainnya lewat dana APBD/APBN, termasuk bantuan teknis dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah

Peran Pendamping Masyarakat, Tim Teknis dan Pemerintah Daerah

Satu hal yang kami percaya sangat penting dalam membantu mitra kerja baik di tingkat lokal maupun Kabupaten/Propinsi untuk mencapai hasil yang diharapkan adalah mendorong partisipasi yang tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pendamping masyarakat bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan perencanaan berbasis-masyarakat yang di dukung oleh kantor Proyek Pesisir Manado, konsultan lokal, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat. Pendamping masyarakat selain bertugas sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan di atas, juga bersama-sama masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan formal dan informal di desa untuk mengadakan penilaian secara partisipatif menyangkut sejarah, kondisi dan isu-isu pengelolaan sumberdaya di desa serta berusaha mencari solusi dan kesepakatan pengelolaan yang tepat.

Pendamping masyarakat dari Proyek Pesisir hidup dan bekerja secara tetap dan penuh dengan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ilmu, dari ilmu kelautan sampai pengembangan masyarakat (Pendamping masyarakat Proyek Pesisir didominasi oleh latar belakang sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan). Walaupun pendamping masyarakat adalah sarjana (S1) namun masih diperlukan investasi demi mengembangkan kapasitas mereka untuk secara efektif berinteraksi dengan masyarakat maupun dalam memahami isu pengelolaan sumberdaya pesisir setempat. Untuk menjamin proses koordinasi dan pelaporan yang cukup, penyuluh lapangan sebulan

sekali mengadakan pelaporan dan pertemuan di kantor Proyek Pesisir (Manado).

Pendamping masyarakat tidak tinggal secara permanen di desa sampai proyek selesai. Setelah rencana pengelolaan dan/atau aturan dikembangkan, disepakati dan pelaksanaan dimulai, dan masyarakat sudah memiliki kapasitas yang cukup dan terlatih untuk melakukan sendiri rencana pengelolaan mereka dan aturan-aturan mereka, pendamping masyarakat ditarik dari lokasi/ desa/masyarakat. Mereka kemudian memulai kegiatan perencanaan dan pengembangan (*outreach*) di desa-desa lain atau sekitar lokasi desa mereka. Lama waktu penempatan pendamping masyarakat di lokasi/desa/ masyarakat berkisar antara satu sampai tiga tahun yang diikuti oleh kunjungan-kunjungan singkat (*part time*) minimal dalam jangka waktu satu tahun setelah mereka ditarik secara tetap dari lokasi. Untuk meneruskan kegiatan pendamping masyarakat ini asisten pendamping masyarakat (anggota masyarakat) yang sudah bekerja sama dan dilatih oleh pendamping masyarakat dan proyek melanjutkan kegiatan di lokasi sebagai motivator dan katalisator.

Untuk memberikan bantuan teknis kepada pendamping masyarakat, staff Proyek Pesisir dan masyarakat maka dibutuhkan tenaga-tenaga teknis (*tim teknis*) yang mempunyai keahlian dan pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu. *Tim teknis* (konsultan) Proyek Pesisir seperti antara lain:

- Penasihat lokal (*local advisor*) yang membantu proyek pesisir sebagai katalisator dengan pemerintah setempat, universitas dan lembaga swasta di daerah serta memberikan masukan teknis terhadap kegiatan/kebijakan pemerintah dan proyek dalam mengembangkan program;
- Konsultan hukum (*legal specialist*) yang membantu proyek dan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan kebijakan dan peraturan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir serta membantu masyarakat desa dan pendamping masyarakat dalam merumuskan aturan lokal (*ordinances*) pengelolaan pesisir seperti Keputusan Desa untuk Daerah Perlindungan Laut dan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Desa;
- Ahli perencanaan pesisir (*coastal planner*) yang mempunyai keahlian di bidang teknik seperti

perubahan garis pantai, erosi dan pekerjaan umum;

- Konsultan di bidang perikanan (budidaya laut dan ikan) yang memberikan masukan bagi kegiatan-kegiatan dibidang budidaya laut dan mata pencaharian tambahan dibidang perikanan; serta
- Konsultan agroforestry yang membantu dalam upaya perlindungan dan konservasi hutan, perlindungan sumber air dan aktivitas pertanian.

Selain membantu *tim/staff* Proyek Pesisir, *tim teknis* juga melakukan pelatihan, penyuluhan, dan memberikan masukan teknis langsung kepada masyarakat.

Pemerintah setempat (khususnya di tingkat desa tetapi juga kadangkala di tingkat yang lebih tinggi) harus dipandang sebagai stakeholder dalam proses perencanaan, dan karena itu perlu dilibatkan sejak awal proses - karena proses partisipasi juga mengharuskan keterlibatan semua stakeholder sejak awal proses. Dimasa lampau banyak proyek berbasis masyarakat yang gagal melibatkan pemerintah setempat sejak awal proses sehingga walupun mayoritas masyarakat sudah siap dalam proses perencanaan namun tidak didukung oleh pemerintah setempat. Dilain pihak banyak kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan.

Peran pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa) sangat penting bagi upaya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di daerah terutama dalam upaya desentralisasi (otonomi) pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Peran, keterlibatan dan dukungan dari pemerintah setempat mulai dari tahap intervensi proyek, penentuan lokasi kegiatan (sebagai lokasi pilot), kebijakan pengelolaan di daerah, keterlibatan langsung dan dukungan pada program yang dikembangkan oleh proyek maupun keterlibatan dan dukungan kepada masyarakat di desa terhadap upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat menentukan keberhasilan program di lapangan. Selain keterlibatan dan dukungan, pemerintah daerah setempat juga berperan dalam memberikan bantuan teknis maupun pendanaan (dana pendamping) bagi kegiatan dan program yang diusulkan serta disepakati oleh masyarakat. Bantuan teknis dan dana seperti ini dilihat oleh masyarakat dan

pemerintah di desa sebagai keseriusan dari pemerintah daerah (Kabupaten dan Propinsi) dalam mendukung program di lapangan. Peran utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah dalam menyetujui rencana pembangunan dan pengelolaan serta keputusan desa, mengadopsi rencana pembangunan dan pengelolaan desa serta replikasi contoh/model yang dikembangkan di desa-desa contoh (*field sites*) ke desa, kecamatan dan kabupaten lain di Sulawesi Utara. Dalam mengoptimalkan dan memadukan peran pemerintah daerah maka dibentuk *Provincial Working Group* (Tim Kerja Propinsi) yang terdiri dari instansi terkait di tingkat propinsi yang kemudian menjadi *Provincial Advisory Committee* (Tim Penasihat Propinsi) dan Komite Pengelolaan Sumberdaya wilayah Pesisir Terpadu. Tim yang sama juga di bentuk di tingkat kabupaten yang diberi nama Kabupaten Task Force yang juga beranggotakan dinas dan instansi terkait di kabupaten serta unsur dari universitas dan LSM. Perbedaan fokus peran antara Tim Penasihat Propinsi dan Kabupaten Task Force terletak pada fungsi koordinasinya yakni di tingkat propinsi tim/komite berperan terutama untuk fungsi memberikan nasihat dan kebijakan propinsi sedangkan untuk Task Force menekankan pada koordinasi kegiatan pelaksanaan di lapangan.

Pembelajaran dalam Program PSWP-BM di Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Kegiatan-kegiatan proyek dilapang telah mendapatkan sejumlah besar produk (seperti laporan-laporan teknis, dokumen profil dan rencana pengelolaan, masyarakat dan staff pemerintah setempat yang telah dilatih, dst) dan yang lebih penting adalah hasil (*outcome*) yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan. Hasil-hasil antara yang penting yang diperoleh dan nyata disemua desa proyek termasuk antara lain:

- Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai isu-isu pengelolaan pesisir dari masyarakat.
- Konsensus dan dukungan dari anggota masyarakat dan pemimpin mengenai isu-isu prioritas yang perlu segera dilaksanakan termasuk tujuan dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan dan mengembangkan potensi dan peluang.
- Perubahan perilaku menyangkut masyarakat

dalam melindungi dan memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan sudah mulai nampak (misalnya menurunnya penggunaan bahan peledak dan racun, penambangan karang, perlindungan terumbu karang, dan penanaman kembali hutan mangrove)

- Menguatnya kapasitas masyarakat dan lembaga di tingkat desa dalam pengelolaan sumberdaya
- Dukungan pemerintah terhadap upaya perencanaan dan pengelolaan berbasis masyarakat dan *bottom-up* mulai dari desa, kabupaten dan propinsi

Di setiap desa lapangan Proyek Pesisir, contoh spesifik hasil nyata di lapangan seperti terlihat dalam Tabel 4.

Hasil dan kemajuan nyata diatas sudah nampak dan diperoleh walaupun rencana pengelolaan baru dilaksanakan dan dievaluasi. Masih banyak upaya yang perlu dilakukan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga di desa dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Mekanisme pengelolaan oleh masyarakat dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan di lapang masih akan dicoba sejalan dengan pelaksanaan rencana pengelolaan desa ini. Diakui bahwa keberlanjutan pendekatan pengelolaan berbasis-masyarakat sebagaimana dihasilkan dan dicoba di Sulawesi Utara ini belum pasti karenanya dibutuhkan beberapa tahun lagi sebelum kita yakin bahwa model/ccontoh yang dikembangkan di Sulawesi Utara ini sesuai untuk diterapkan di Indonesia secara umum dan di Sulawesi Utara secara khusus.

Kemajuan dan hasil nyata juga telah diperoleh di tingkat propinsi dan kabupaten dalam melembagakan contoh pendekatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir-berbasis masyarakat ini kedalam program pemerintah setempat. Hasil spesifik yang diperoleh antara lain:

- Meningkatnya dukungan di antara lembaga-lembaga utama di tingkat Propinsi dan Kabupaten (khususnya Bappeda dan Dinas Perikanan dan Kelautan) bagi program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir khususnya DPL untuk disebarluaskan dan diterapkan di desa-desa lain.
- Pengakuan bahwa pendekatan pengelolaan

Bentenan-Tumbak	Talise	Blangko
<ul style="list-style-type: none"> • Penghutanan kembali mangrove berjalan dengan baik • Distribusi dan suplay air bersih diperbaiki • Berkurangnya aktivitas pemboman ikan dan penambangan karang • Populasi Bintang Laut Berduri dapat di control • Mata pencaharian pengganti bagi pengguna bahan peledak dan racun sudah dikembangkan (seaweed, perahu motor katinting, budidaya kerang) • Penetapan DPL di Desa Tumbak 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya banjir di Pulau Kinabohutan lewat contruksi tanggul • Sertifikat tanah sebanyak 220 telah diperoleh oleh masyarakat • Penambangan karang dan pasir sudah mulai dilarang untuk mencegah erosi • Mata pencaharian tambahan lewat pengadaan motor katinting dan kerajinan tangan mulai dikembangkan • Penanaman kembali mangrove sudah dilakukan oleh kelompok- kelompok masyarakat • Penetapan DPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan air bersih semakin baik di desa lewat penambahan pipa dan kontruksi air bersih ke lingkungan penduduk • Kesehatan dan kebersihan masyarakat semakin baik lewat pengadaan MCK dan sumur gali • Meningkatnya kelimpahan dan spesies ikan di dalam Daerah Pelindungan Laut (DPL) • Meningkatnya tutupan karang di dalam DPL

Tabel 4. Contoh-contoh hasil nyata di tiap desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara

berbasis-masyarakat yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir sebagai uji coba dan punya potensi yang baik untuk dipakai sebagai model/ccontoh program desentralisasi sesuai UU No 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan karena itu keinginan untuk secara adaptive mencoba pendekatan baru untuk mengembangkan strategi penyebarluasan model secara lebih luas lagi (*scaling-up model*).

- Meningkatnya pemahaman dan diskusi-diskusi mengenai proses dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam keberhasilan upaya penyebarluasan model dalam program pemerintah daerah.
- Kesepakatan bahwa upaya penyebarluasan (*scaling-up*) dapat dimulai melalui program dan lembaga yang ada di daerah dan melalui usulan dana APBN/APBD untuk memulai replikasi di tingkat Kabupaten (Minahasa) dan Propinsi (Sulawesi Utara). Replikasi sementara dilakukan di Kecamatan Likupang sedangkan contoh PSWP-BM sudah mulai diadopsi oleh lembaga

donor lainnya seperti JICA dan masyarakat sekitar.

- Sementara diagendakan oleh DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa mengenai PSWPT-BM

Sebelum Proyek Pesisir ini berakhir, maka diharapkan berbagai capaian dan hasil yang dapat dilihat, ditinggalkan dan diteruskan oleh masyarakat adalah antara lain:

- Daerah Perlindungan Laut (*Marine Sanctuary*) di tiap desa Proyek Pesisir dibentuk dan berjalan dengan baik.
- Rencana Pengelolaan dapat dilaksanakan, dievaluasi dan dilembagakan oleh Pemda.
- Pusat Informasi Sumberdaya Wilayah Pesisir di Desa dibangun dan dimanfaatkan.
- Ekoturisme berbasis masyarakat di Talise dan Bentenan berkembang.
- Sanitasi lingkungan masyarakat meningkat.
- Banjir dan erosi berkurang.
- Hutan bakau, terumbu karang dan lamun terpelihara dengan baik.

- Hutan dan satwa langka dilindungi dan lestari
- Agroforestry dan kegiatan pertanian berkembang dengan baik.
- Sumber mata air terlindungi.
- Kegiatan penangkapan ikan secara destruktif berkurang dan dilarang.
- Adanya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik dalam menentukan areal pemanfaatan diantara pengguna sumberdaya laut di desa (terutama di Talise dan Bentenan -Tumbak)
- Kelompok Pengelola aktif dan berperan dengan baik.
- Masyarakat mampu memahami dan menangani isu secara mandiri.
- Kemampuan dalam melakukan evaluasi secara partisipatif untuk pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- Aturan-aturan yang sudah dikembangkan ditetapkan dilaksanakan (penegakan aturan)
- Berkembangnya mata pencaharian tambahan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Dari pengalaman Proyek Pesisir dalam memfasilitasi PSDWP-BM maka sejumlah pelajaran dan kesimpulan dapat dirangkum. Dokumentasi pembelajaran dari kegiatan Proyek Pesisir ini sejak tahun 1999 sudah dilakukan oleh Learning Team Institut Pertanian Bogor dan sudah dipresentasikan dalam Learning Team Workshop di Bogor dan ditulis dalam beberapa dokumen (Sondita *et.al.* 1999, 2000, 2001). Pelajaran dan kesimpulan yang dipaparkan berikut ini sebagiannya mungkin sudah dipaparkan dalam dokumen-dokumen tersebut.

Rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pengelolaan merupakan hal yang penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat desa di wilayah pesisir apabila dilatih dan diperkuat kemampuan dan kapasitas mereka serta diberi kepercayaan secara partisipatif akan mampu bertanggungjawab secara baik dalam mengelola sumberdana dan sumberdaya secara baik, mampu melakukan pemantauan/monitoring kondisi sumberdaya pesisir secara tepat serta dapat dirubah dari pemanfaat murni sumberdaya menjadi pengelola sumberdaya mereka sendiri.

Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelompok yang bertugas untuk

melaksanakan rencana pengelolaan harus mendapatkan perhatian serius dan penekanan utama selama proses persiapan, perencanaan, bahkan harus dilanjutkan sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa kapasitas yang cukup bagi pengelolaan maka kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin.

Program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir-berbasis masyarakat harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan bersama (*co-management*) atau secara kolaboratif dimana masyarakat dan pemerintah setempat (di desa, kecamatan dan ditingkat kabupaten) secara aktif bekerjasama selama proses perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi masyarakat akan sangat efektif apabila diintegrasikan sejak awal proses perencanaan bersamaan dengan keterlibatan aktif dari lembaga pemerintah. Karena belum ada pengalaman dan tradisi yang cukup panjang menyangkut "bottom-up planning" dan partisipasi masyarakat yang nyata, penekanan dan perhatian pada pengembangan kapasitas sangat penting bagi pengelolaan berbasis-masyarakat.

Dukungan dari pejabat pemerintah ditingkat kabupaten dan propinsi akan juga mempercepat kemungkinan keberhasilan program. Demikian juga di tingkat desa, dukungan yang kuat dari pemimpin setempat pada saat memulai proses perencanaan akan menjamin bahwa proses perencanaan tersebut berhasil dan mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana pengelolaan. Bila dukungan yang kuat dari masyarakat sudah dibangun dan rencana pengelolaan sudah ditetapkan maka perubahan dalam kepemimpinan di desa akan memberikan dampak yang kecil atau tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan.

Ketrampilan dan komitmen pendamping masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan program, namun demikian masih diperlukan investasi bagi pengembangan kapasitas dari pendamping lapangan terutama dalam ketrampilan dan kemampuannya untuk pengembangan masyarakat, menumbuhkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan pesisir terpadu.

Pelaksanaan awal perlu dilakukan untuk membangun dukungan masyarakat bagi konsep Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir - Berbasis Masyarakat, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang membantu masyarakat dalam

proses dan membantu meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis-masyarakat. Pelaksanaan awal juga berperan sebagai ujicoba pelaksanaan pengelolaan dan proses belajar masyarakat dalam pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Mengingat tujuan pelaksanaan awal di atas, maka jenis pelaksanaan awal tidak terlalu penting tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat dan proses dalam menentukan jenis pelaksanaan awal tersebut. Karena itu kegiatan seperti MCK, pusat informasi, mata pencaharian tambahan dll. cocok untuk ditetapkan/diterima sebagai kegiatan pelaksanaan awal.

Lembaga yang terlibat memerlukan kerjasama dan keterlibatan dengan masyarakat sampai tahap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan sudah berjalan dengan baik. Lembaga yang terlibat harus tinggal di lokasi sampai masyarakat sudah benar-benar siap dan memiliki kapasitas yang cukup untuk secara mandiri mengelola sumberdaya mereka. Lembaga atau badan pengelola lokal yang dibentuk sudah harus terorganisasi dan berjalan dengan baik sebelum lembaga yang terlibat ditarik/keluar dari masyarakat. Penarikan lembaga dari desa harus dilakukan secara perlahan-lahan.

Metode partisipasi harus menggunakan metode formal dan informal. Secara formal adalah melalui pertemuan masyarakat, diskusi dan presentasi lewat lembaga formal yang ada di desa termasuk sekolah, organisasi keagamaan, arisan, dll. Secara informal melalui diskusi tatap muka antara individu, dari rumah ke rumah, di tepi pantai dan jalan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan produktif dalam masyarakat seperti dalam pesta kawin, ulang tahun, kematian, menangkap ikan, panen dll. Metode/pendekatan informal memiliki nilai yang sama dan bahkan lebih penting daripada pendekatan formal namun metode informal memerlukan waktu yang panjang tetapi kadangkala lebih efektif daripada metode formal.

Setelah rencana pengelolaan disepakati, maka untuk menjamin keberlanjutannya dibutuhkan jaringan kerjasama dan keterlibatan dengan luar dan lokal yang mendukung rencana pengelolaan tanpa memandang apakah lembaga tersebut dari LSM, universitas maupun lembaga pemerintah.

Proses pembuatan Rencana Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir -

Berbasis Masyarakat memerlukan waktu minimal satu tahun. Untuk mendapatkan rencana berbasis masyarakat yang efektif memerlukan proses partisipatif yang tinggi dan dukungan dari mayoritas masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apabila dibentuk kurang dari satu tahun maka kemungkinan untuk kelanjutan dan keberhasilan sulit di capai atau dipertahankan. Pengalaman di berbagai negara seperti Filipina, untuk membangun komitmen dan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan berbasis-masyarakat memerlukan waktu yang panjang.

Perubahan lingkungan dan kondisi sumberdaya tidak akan nampak dalam waktu singkat dan diperlukan beberapa tahun setelah rencana pengelolaan tersebut di sepakati dan diimplementasikan sampai perubahan ini mulai kelihatan. Dampak terhadap masyarakat bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada perubahan lingkungan. Pada beberapa kasus intervensi khusus seperti daerah perlindungan dapat menunjukkan hasil yang lebih cepat seperti dalam peningkatan dan perubahan terhadap kelimpahan ikan, keanekaragaman species dan tutupan karang - perubahannya dapat diperoleh minimal dalam waktu satu tahun. Dalam hal produksi perikanan disekitar daerah perlindungan laut, sebagaimana pengalaman di Filipina dan Pasifik Selatan, diperlukan waktu antara tiga sampai lima tahun setelah daerah perlindungan ditetapkan.

Untuk mencapai keberhasilan pendekatan berbasis-masyarakat hal yang penting adalah perlunya menempatkan secara tetap tenaga penyuluh lapangan yang berpengalaman dan terlatih yang akan memotivasi, mengkoordinasi, memfasilitasi dan melatih masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis-masyarakat di desa. Sumberdaya dan perhatian khusus dalam membangun kapasitas sumberdaya manusia untuk program-program berbasis-masyarakat perlu dilakukan sejak dari awal yang di barengi dengan pelatihan jangka pendek yang mampu diterima oleh masyarakat desa dapat dilaksanakan jika ada tenaga penyuluh lapangan yang mencurahkan waktu dan tenaganya secara penuh di desa.

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir untuk menjamin kualitas dan kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dimana

banyak penduduk miskin menggantungkan hidupnya sangat diperlukan. Program-program desentralisasi dapat lebih efektif/murah biayanya, lebih adil/seimbang dan lebih lestari/berkesinambungan dibanding program-program terpusat (*centralized*).

Penghargaan

Proyek Pesisir Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada panitia Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu yang telah mengundang Proyek Pesisir Sulawesi Utara untuk menyampaikan presentasi dan makalah dalam pelatihan ini. Terima kasih kepada BAPPEDA Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa beserta lembaga terkait dalam Tim Pengarah Propinsi dan Tim Kerja Kabupaten Minahasa yang memberikan bantuan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Kami berterima kasih kepada USAID sebagai penyandang dana kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Opini dan pandangan yang dikemukakan dalam paper ini adalah opini dan pandangan penulis dan tidak merupakan pandangan dari CRC-URI, USAID, maupun mitra kerja dari Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablaza-Baluyut, E. 1995. The Philippine fisheries sector program. pp. 156-177. In: Coastal and Marine Environmental Management: Proceedings of a Workshop. Bangkok, Thailand, 27-29, March, 1995. Asian Development Bank. pp. 331.
- Buhat, D. 1994. Community-based coral reef and fisheries management, San Salvador Island, Philippines. pp. 33-49. In: White, A. T., L.Z. Hale, Y Renard and L. Cortesi. (Eds.) 1994. Collaborative and community-based management of coral reefs: lessons from experience. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA. pp. 124.
- Calumpang H. 1993. The Role of Academe in Community Based Coastal Resource Management: The Case of APO Island. In: Proceedings of the Seminar Workshop on Community-Based Coastal Resources Management: Our Sea Our Life. Lenore P. C. (eds.). Voluntary Services Overseas, New Manila, Quezon City, Philippines.
- Crawford, B.R., I. Dutton, C. Rotinsulu, L. Hale. 1998. Community-Based Coastal Resources Management in Indonesia: Examples and Initial Lessons from North Sulawesi. Paper presented at International Tropical Marine Ecosystem Management Symposium, Townsville, Australia, November 23-26
- Crawford, B.R., P. Kussoy, A. Siahainenia and R.B. Pollnac, 1999. Socioeconomic Aspects of coastal resources use in Talise, North Sulawesi. Proyek Pesisir Publication. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett, Rhode Island, USA. pp. 67
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1998a. Metodological approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1998b. Marine Sanctuary as a Community Based Coastal Resources Management Model for North Sulawesi and Indonesia. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999a. Scaling-up Initial Models of Community-Based Marine Sanctuaries into a Community Based Coastal Management Program as a Means of Promoting Marine Conservation in Indonesia. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and the US Agency for International Development. Jakarta.
- Crawford, B.R., J.J. Tulungen. 1999b. Concept for a Decentralized Provincial and/or Kabupaten Coastal Management Program in North Sulawesi. Working Paper. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island and US Agency for International Development. Jakarta.
- Ferrer, E. M., L. Polotan-Dela Cruz and M. Agoncillo-Domingo (Eds.). 1996. Seeds of hope: A collection of case studies on community based coastal resources management in the Philippines. College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines. pp. 223.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, dan N. Mangampe. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. In press. Proyek Pesisir. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu and A. Soemodinoto. 1997. Rapid Assesment of Coastal Management Issues on the Coast of Minahasa. Coastal Resources Management Project - Indonesia. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, and the US Agency for International Development, pp. 60.
- Polotan-de la Cruz, L. 1993. Our Life Our Sea. Proceedings of the seminar workshop on community-based coastal resources management. February 7-12, 1993, Silliman University, Dumaguete City, Philippines. Voluntary Services Overseas, Quezon City, Philippines. pp. 95.

- Pomeroy, R.S. 1994. Community management and common property of coastal fisheries in Asia and the Pacific: concepts, methods and experiences. ICLARM Conf. Proc. 45. International Center for Living Aquatic Resources Management, Metro Manila Philippines. pp.185.
- Pomeroy, R.S. and M.B. Carlos. 1997. Community-based coastal resources management in the Philippines: a review and evaluation of programs and projects, 1984-1994. *Marine Policy*. Vol. 21. No. 5. pp. 445-464.
- McManus, J.W., C. vanZwol, L.R. Garces and D. Sadacharan. Editors. 1998. A framework for future training in marine and coastal protected area management. *Proceeding ICLARM Conference 57*. 54p.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 1999. Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 1999. *Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir*. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). 2000. Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2000. *Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir*. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, B. Priyanto dan A. Tahir (editors). Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2001. *Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir*. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island
- Tangkilisan, N., V. Samuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumul dan S. Tompoh. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. In press. *Proyek Pesisir*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Naragansett, Rhode Island, USA.
- Tulungen, J.J., P. Kussoy, B.R. Crawford. 1998. Community Based Coastal Resources Management in Indonesia: North Sulawesi Early Stage Experiences. Paper presented at Convention of Integrated Coastal Management Practitioners in the Philippines. Davao City. 10 - 12 Nopember.
- Tulungen, J.J., B.R. Crawford, I. Dutton. 1999. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara sebagai salah satu contoh Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pesisir. Paper dipresentasikan dalam Seminar Ilmiah hasil-hasil Penelitian Unggulan, Likupang, Sulawesi Utara, 15 Desember 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1997. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1999. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- White A.T. 1989. Two Community-based marine reserves: Lessons Learned for Coastal Management. P. 85-96. In: *Coastal Area Management in Southeast Asia: Policies, Management Strategies and Case Studies*. *Proceeding ICLARM Conference 19*. T.E Chua and D. Pauly (eds.) 254 p. Ministry of Science and Technology and the Environment, Kuala Lumpur, Johor State Economic Planning Unit, Johore Baru, Malaysia; and International Center for Living Aquatic Resources Mangement, Manila, Philippines.
- White A.T., L. Z. Hale, Y. Renard, L. Cortesi. 1994. Collaborative and Community-Based Management of Coral Reefs: Lesson from Experience. Kumarian Press. West Hartford, Con. USA.
- White A.T, A. Cruz-Trinidad. 1998. The values of Philippine Coastal Resources: Why Protection and Management are Critical. *Coastal Resources Management Project*, Cebu City, Philippines, 96p.
- World Bank. 1999. Voices from the village: a comparative study of coastal resource management in the Pacific Islands. *Pacific Islands Discussion Paper Series Number 9 (and No. 9A-Summary Report)*. World Bank, East Asia and Pacific Region, Papua New Guinea and Pacific Islands Country Management Unit. Washington D.C. USA.

Table 1: Model Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu - Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

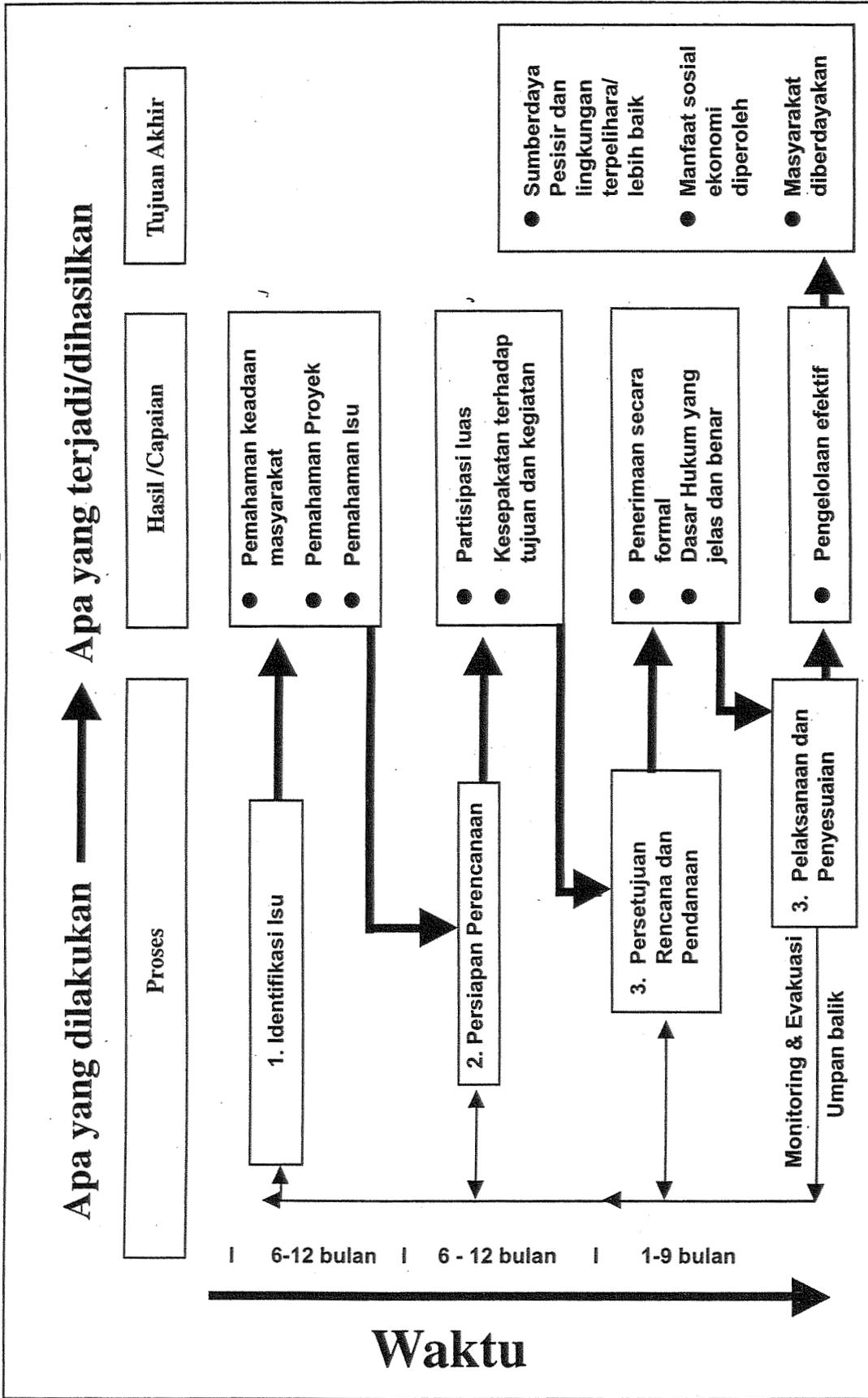


Table 2 : Contoh Partisipasi/peran Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir - Berbasis Masyarakat.

Langka dalam Proses	Partisipasi/Peran Masyarakat dalam Program Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Pesisir
Identifikasi Isu	<ul style="list-style-type: none"> ● Partisipasi dalam pengumpulan data dasar dan pelatihan pengumpulan data ● Menghadiri pertemuan dalam identifikasi isu dan analisis isu ● Memberikan masukan terhadap permasalahan dan isu serta berperan dalam penentuan prioritas isu ● Berpartisipasi dalam penyusunan dan diseminasi profil desa ✓
Persiapan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup ✓ ● Berpartisipasi dalam Pelatihan ICM (pengelolaan Pesisir Terpadu) ✓ ● Berpartisipasi dalam pembuatan draft rencana pengelolaan ✓ ● Pengambil keputusan dalam kegiatan pelaksanaan awal (early action) ✓ ● Pengambil keputusan dan pemberi masukan dalam rencana pengelolaan desa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Klarifikasi Isu, Visi, Tujuan Pengelolaan ✓ ✓ Kegiatan-kegiatan pengelolaan ✓ ✓ Sistem monitoring ✓ Struktur kelembagaan ✓ ● Pemimpin dan pelaksana dalam proses konsultasi, sosialisasi, perbaikan dan diseminasi draft rencana pengelolaan kepada masyarakat desa, pemerintah setempat sampai pemerintah dan stakeholder tingkat propinsi
Persetujuan Rencana dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengorganisasian dalam semua rapat musyawarah desa untuk menentukan dan menyetujui rencana pengelolaan ● Memilih atau menolak sebagian atau keseluruhan rencana pengelolaan desa serta aturan desa bagi pelaksanaan rencana pengelolaan ● Bersama-sama dengan pemerintah desa dan kabupaten menyetujui strategy dan pendanaan pelaksanaan rencana pengelolaan ● Berpartisipasi dalam peluncuran dokumen rencana pengelolaan desa
Pelaksanaan dan Penyusuaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Berpartisipasi dalam rapat pembuatan rencana tahunan desa ● Berpartisipasi dalam rapat untuk menentukan badan pengelola dan lembaga bagi implementasi rencana pengelolaan ● Pengambil keputusan bagi prioritas rencana kerja tahunan desa bagi implementasi rencana pengelolaan ● Bertindak sebagai pengawas dan pengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana pengelolaan

Table 3: Kerangka kerja konsep pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir terpadu Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara

Langkah dalam	Kegiatan	Hasil di Harapkan	Indikator
Identifikasi isu	<ul style="list-style-type: none"> - Survey data dasar - Identifikasi Kelompok Inti, Kelompok Fokus dan stakeholders - Pertemuan informal/formal untuk menggali info dan isu - Pelatihan Kelompok Inti untuk identifikasi dan analisa isu - Penyusunan draft profil - Sosialisasi, konsultasi isu-isu kepada masyarakat, Pemerintah Desa, KTF, dan secara tekhnis kepada proyek Pesisir - Perbaikan dokumen profil - Desiminasi profil - Pelaksanaan awal dilaksanakan PLH dan pelatihan masyarakat serta studi banding 	<ul style="list-style-type: none"> - Data dasar mengenai desa (sejarah, lingkungan, sosial ekonomi) - Terbentuknya Kelompok Inti - Diperoleh konsesus tentang isu dan tingkat kesadaran masyarakat - Diperoleh info mengenai stakeholder di desa dan keaktifan kelompok inti - Isu-isu dapat diidentifikasi - Masyarakat dan kelompok inti memahami Program - Kapasitas masyarakat untuk pengelolaan ditingkatkan - Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup maningkat - Penanganan awal isu-isu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada laporan data dasar - Kelompok Inti terbentuk - Dokumen profil diselesaikan dan disepakati - Jumlah pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan, jumlah rapat, studi banding, pertemuan tingkat desa dan KTF - Jumlah peserta - Jumlah pelaksanaan awal yang telah dilaksanakan dan jumlah peserta yang terlibat dalam pelaksanaan awal - Laporan pelaksanaan awal dan pertanggungjawaban keuangan - Frekuensi pemanfaatan destruktif jadi berkurang - Meningkatkan frekuensi kegiatan pengawasan dan penindakan kegiatan merusak
Persiapan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya dan pelatihan - Pengelolaan Pesisir terpadu (ICM) - Pelatihan Kelompok Inti untuk penyusunan rencana - Penyusunan draft rencana pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya visi, strategi, tujuan dan kegiatan serta kelembagaan dalam pengelolaan - Adanya konsensus rencana pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya draft Rencana Pengelolaan ✓ - Jumlah pertemuan dan konsultasi lokakarya dan sosialisasi masyarakat desa - Banyaknya input-input dari

	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, konsultasi isu-isu prioritas kepada masyarakat, pemerintah dan instansi terkait - Perbaikan dokumen Rencana Penggunaan dan pengelolaan Desiminasi Rencana - Pembangunan dan Pengelolaan Pelaksanaan awal dilanjutkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Diketahui dan ditetapkannya isu-isu prioritas oleh masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi terkait - Masukan, koreksi dan tambahan dari pihak-pihak terkait 	<p>masyarakat dan Instansi terkait mengenai Rencana Pengelolaan.</p>
<p>Peretujuan Rencana dan pendanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah desa untuk persetujuan - Pertemuan/Lokakarya KTF untuk membahas draft dan persetujuan rencana - pembangunan dan pengelolaan Review dari pemerintah Kabupaten untuk kegiatan dan sumber dana - Penandatanganan dan peresmian Rencana Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan akhir yang bersifat formal dari masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan - Persetujuan tujuan, strategy, kegiatan, kelembagaan dan sumber dana - Dukungan penuh dari pemerintah/Instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah umum persetujuan Rencana pengelolaan dan pembangunan - Ditandatanganinya Rencana Pengelolaan melalui SK Desa oleh pemerintah setempat - Kegiatan pelaksanaan Rencana Pengelolaan akan teranggarkan dalam RAPBD/RAPBN
<p>Pelaksanaan dan Penyesuaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan rencana tahunan - Bantuan dana (grant) pelaksanaan - Pengusulan kegiatan tahunan lewat musbang/rakorbang - Evaluasi dan Monitoring kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana tahunan disepakati - Kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat - Kegiatan didanai - Kegiatan dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana tahunan - Pelaksanaan efektif - Jumlah dana yang dianggarkan disepakati